

**Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum  
dan HAM  
Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung  
DITJEN IMIGRASI  
(UAPPA-W)  
AUDITED**

yang berakhir Per 31 Desember 2021

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur  
Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Air Itam-Pangkalpinang

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung UAPPA-W (DITJEN IMIGRASI) adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung UAPPA-W (DITJEN IMIGRASI) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung UAPPA-W (DITJEN IMIGRASI). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, Mei 2022  
Kepala Kantor Wilayah,  
  
T. Daniel L. Tobing  
NIP. 196212301988031001

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>	
Kata Pengantar		2
Daftar Isi		3
Pernyataan Tanggung Jawab		4
Ringkasan		5
I. Laporan Realisasi Anggaran		7
II. Neraca		8
III. Laporan Operasional		9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas		10
V. Catatan atas Laporan Keuangan		11
A. Penjelasan Umum		11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran		25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca		34
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional		43
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas		51
F. Pengungkapan Penting Lainnya		53
VI. Lampiran dan Daftar		



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam – Pangkalpinang  
Telp. (0717) 439435 – 439439 Fax (0717) 439435

Laman : <http://babel.kemenkumham.go.id> Email : kanwil.babel@kemenkumham.go.id

---

## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (DITJEN IMIGRASI) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari:(a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, Mei 2022  
Kepala Kantor Wilayah,



T. Daniel L. Tobing  
NIP. 196212301988031001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 80.225.723 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 80.225.723 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 13.837.202.828 atau mencapai 88 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 15.797.799.000

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 38.191.886.093 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 912.598.198 Aset Tetap (neto) sebesar Rp 37.276.310.970 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 2.976.925

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0 dan Rp 38.191.886.093

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-

LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 19.483.200 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 14.643.182.556 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp (14.623.699.356). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp Rp. 29.383.023 dan Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (14.594.316.333).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp 38.965.796.301 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (14.594.316.333) kemudian dikurangi dengan koreksi – koreksi sebesar Rp (52.096.201). Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 13.768.309.924 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 38.191.886.093

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG  
(DITJEN IMIGRASI)  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN  
TAHUN 2020**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		80.225.723	0,00	39.619.752
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>80.225.723</b>	<b>0,00</b>	<b>39.619.752</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	5.828.827.000	5.758.176.760	98,79	5.142.793.760
Belanja Barang	B.4	9.249.756.000	7.388.200.068	79,87	6.552.617.175
Belanja Modal	B.5	719.216.000	690.826.000	96,05	2.948.701.100
Belanja Bantuan Sosial	B.6				-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>15.797.799.000</b>	<b>13.837.202.828</b>	<b>87,59</b>	<b>14.644.112.035</b>

**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG  
(DITJEN IMIGRASI)  
NERACA  
PER 31 Desember 2021 DAN TAHUN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	PER 31 Desember 2021	TAHUN 2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	51.378.066
Persediaan	C.10	912.598.198	776.187.651
Jumlah Aset Lancar		912.598.198	827.565.717
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	22.967.908.000	22.967.908.000
Peralatan dan Mesin	C.15	13.654.485.883	12.451.899.982
Gedung dan Bangunan	C.16	14.834.381.628	15.067.916.303
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17		
Aset Tetap Lainnya	C.18	13.334.998	13.334.998
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19		-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(14.193.799.539)	(12.399.879.446)
Jumlah Aset Tetap		37.276.310.970	38.101.179.837
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	43.808.227	40.898.932
Aset Lain-Lain	C.22	679.521.524	679.521.524
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(720.352.826)	(683.369.709)
Jumlah Aset Lainnya		2.976.925	37.050.747
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>38.191.886.093</b>	<b>38.965.796.301</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.31	38.191.886.093	38.965.796.301
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>38.191.886.093</b>	<b>38.965.796.301</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>38.191.886.093</b>	<b>38.965.796.301</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG  
(DITJEN IMIGRASI)  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN TAHUN 2020**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	PER DESEMBER 2021	TAHUN 2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	19.483.200	15.861.352
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>19.483.200</b>	<b>15.861.352</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	5.758.176.760	5.142.793.760
Beban Persediaan	D.3	594.746.378	697.090.754
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.302.939.605	4.412.555.231
Beban Pemeliharaan	D.5	903.254.538	776.464.761
Beban Perjalanan dinas	D.6	1.481.109.402	1.034.576.542
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.602.955.873	1.755.644.092
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>14.643.182.556</b>	<b>13.819.125.140</b>
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(14.623.699.356)	(13.803.263.788)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	310.000	1.500.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			10.071.300
Pendapatan Non Operasional Lainnya		60.432.523	531.428.524
Beban Non Operasional Lainnya		31.359.500	455.295.100
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		29.383.023	67.562.124
POS LUAR BIASA		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(14.594.316.333)</b>	<b>(13.735.701.664)</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEP.BANGKA BELITUNG  
(DITJEN IMIGRASI)  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN TAHUN 2020**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	PER 31 Desember 2021	TAHUN 2020
EKUITAS AWAL	E.1	38.965.796.301	36.891.720.421
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(14.594.316.333)	(13.735.701.664)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGUTANGI ENTITAS	E.4	52.096.201	(17.394.833)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.5		
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.6		1.818.763
SELISIH REVALUASI ASET	E.7		(19.213.596)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.6	52.096.201	
LAIN- LAIN	E.7		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		13.768.309.924	15.827.172.377
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS		(773.910.208)	2.074.075.880
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.7</b>	<b>38.191.886.093</b>	<b>38.965.796.301</b>

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I. , Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi Kep. Bangka Belitung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Entitas berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkapinang- Bangka Belitung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Ditjen Imigrasi berkomitmen dengan visi **“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa misi sebagai berikut:

- Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas.
- Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas.
- Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkualitas.
- Mewujudkan Penghormatan, pemenuhan, dan Perlindungan HAM.
- Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan HAM.

- Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Yang Profesional dan Berintegritas.

Adapun Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung yaitu “PASTI” :

- Profesional
- Akuntabel
- Sinergi
- Transparan
- Inovatif

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Semester Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah 3 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

*Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W*

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	3000	Kanwil Div Imigrasi Babel	-	1	-	-	1
2	3000	Kanim Pangkalpinang	-	1	-	-	1
3	3000	Kanim TanjungPandan	-	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>			-	3	-	-	3

*Basis Akuntansi*

**A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

#### *Pendapatan- LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Pendapatan- LO*

### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat

berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1000.000 (Satu Juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

***Penggolongan Masa manfaat Aset tak Berwujud***

<b>Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Pneyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonim Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

***Kewajiban***

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## **(7) Ekuitas**

### *Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi  
Pendapatan  
Rp.  
80.225.723

### B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 80.225.723 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung berasal Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu.

Pendapatan didapatkan dari UPT imigrasi berupa sewa rumah dinas dan Pemindahtanganan BMN berupa lelang bongkaran. sedangkan Penerimaan PNBK Keimigrasian sudah diambil alih oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Pend dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	310.000	1.500.000	
Pend. Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	19.483.200	15.421.474	26,34
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		439.878	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		2.213.700	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		18.638.500	
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	60.432.523	7.777.000	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>80.225.723</b>	<b>45.990.552</b>	<b>74,44</b>

Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp. 310.000,- merupakan pendapatan dari biaya lelang hasil bongkaran BMN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.

Pendapatan Sewa, gedung sebesar Rp 19.483.200 merupakan sewa atas penggunaan rumah dinas oleh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 19.224.000 dan pada Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan sebesar Rp 259.200

Penerimaan Kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp 60.432.523 merupakan pengembalian belanja modal tahun anggaran 2020 atas hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI pada Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang atas Renovasi Gedung Perkantoran.

*Realisasi  
Belanja  
Negara Rp.  
13.837.202.828*

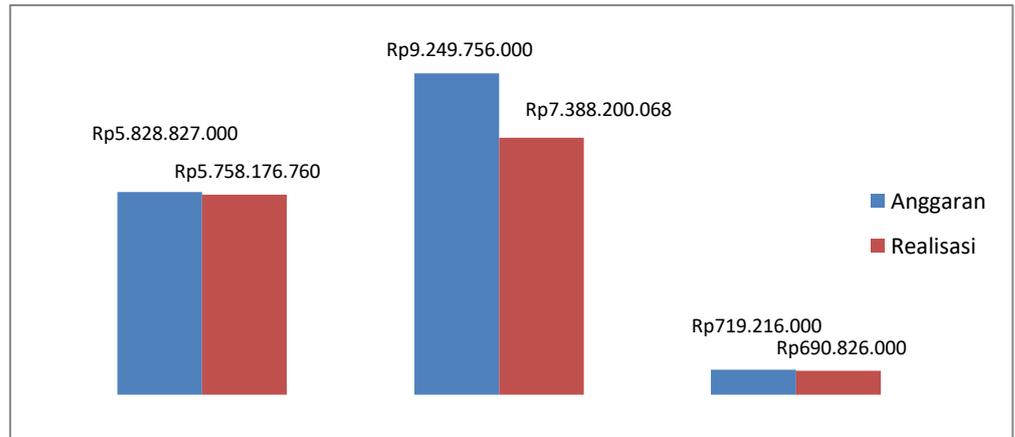
## **B.2. BELANJA**

Realisasi Belanja Semester II Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 13.837.202.828 atau 87,59% dari anggaran belanja sebesar Rp 15.797.799.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II Per 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut:

### *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2021*

Uraian	Per 31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5.828.827.000	5.758.176.760	98,79
Belanja Barang	9.249.756.000	7.388.200.068	79,87
Belanja Bantuan Sosial			
Belanja Modal	719.216.000	690.826.000	96,05
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>15.797.799.000</b>	<b>13.837.202.828</b>	<b>87,59</b>
Pengembalian Belanja	-		
<b>Total Belanja</b>	<b>15.797.799.000</b>	<b>13.837.202.828</b>	<b>87,59</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 5,51 % karena adanya penurunan Pagu Belanja Modal dari Rp 3.020.000 menjadi 719.216.000. Berikut rincian belanja TA 2021 dan TA 2020

*Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020*

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.758.176.760	5.142.793.760	11,97
Belanja Barang	7.388.200.068	6.552.617.175	12,75
Belanja Bantuan Sosial			
Belanja Modal	690.826.000	2.948.701.100	(76,57)
<b>Jumlah</b>	<b>13.837.202.828</b>	<b>14.644.112.035</b>	<b>(5,51)</b>

*Belanja  
Pegawai Rp  
5.758.176.750*

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 5.758.176.760 dan Rp 5.142.793.760. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,97% dari TA 2020. Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya penambahan pegawai baru sebanyak 9 (sembilan) CPNS di Tahun 2021 sehingga pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang berjumlah 61 (enam puluh satu) pegawai pada periode Desember Tahun 2021 dan adanya pergeseran para pejabat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.
2. Adanya penambahan pegawai baru sebanyak 7 (tujuh) CPNS di Tahun 2021 sehingga pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpandan berjumlah 35 (tiga puluh lima) pegawai pada periode Desember Tahun 2021 dan adanya pergeseran para pejabat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandaai

*Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020*

URAIAN	REALISASI PER 31 DES 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	3.846.299.140	3.469.869.740	10,85
Belanja Pembulatan Gaji PNS	77.798	57.338	35,68
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	238.329.404	224.152.890	6,32
Belanja Tunjangan Anak PNS	58.985.024	59.601.264	(1,03)
Belanja Tunjangan Struktural PNS	175.420.000	164.130.000	6,88
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	260.700.000	253.680.000	
Belanja Tunjangan PPH PNS	1.795.602	1.762.900	1,86
Belanja Tunjangan Beras PNS	223.850.220	175.401.240	27,62
Belanja Uang Makan PNS	760.896.000	655.163.000	16,14
Belanja Tunjangan Umum PNS	96.265.000	63.640.000	51,26
Belanja Uang Lembur	96.484.000	75.811.000	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5.759.102.188</b>	<b>5.143.269.372</b>	<b>11,97</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	925.428	475.612	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.758.176.760</b>	<b>5.142.793.760</b>	<b>11,97</b>

Terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp 925.428 yang terdiri dari Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp 925.000 dan Pengembalian Belanja

Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp 428 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang. Hal ini disebabkan adanya perpindahan Jabatan dari Fungsional Umum ke Fungsional Tertentu sehingga pegawai tersebut harus mengembalikan kelebihan pembayaran atas Tunjangan Umum tersebut.

*Belanja*

*Barang Rp*

*7.388.200.068*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 7.388.200.068 dan Rp 6.552.617.175. Belanja Barang adalah pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,75% dari realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya belanja barang operasional, belanja barang persediaan, belanja pemeliharaan, serta belanja perjalanan dalam negeri.

*Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020*

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.496.105.107	1.358.887.550	10,10
Belanja Barang Non Operasional	1.730.318.391	1.853.953.696	(6,67)
Belanja Barang Persediaan	741.721.039	314.434.942	135,89
Belanja Jasa	1.025.138.041	1.206.749.099	(15,05)
Belanja Pemeliharaan	913.808.088	785.297.846	16,36
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.502.569.789	1.034.576.542	45,24
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>7.409.660.455</b>	<b>6.553.899.675</b>	<b>13,06</b>
Pengembalian Belanja	21.460.387	1.282.500	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7.388.200.068</b>	<b>6.552.617.175</b>	<b>12,75</b>

Pengembalian Belanja Barang merupakan Pengembalian Perjalanan Dalam Negeri yang disebabkan oleh Pembayaran Perjalanan Biasa dengan metode LS sehingga pegawai yang melakukan perjalanan harus mengembalikan sisa uang

Perjalanan yang tidak terpakai.

Adapun Informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid adalah sebesar Rp 531.526.000 Anggaran tersebut terserap sebesar Rp 458.395.332 dengan rincian sebagai berikut

URAIAN	Anggaran	REALISASI TA 2021	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	144.160.000	143.953.711	99,86
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			
Belanja Persediaan -Penangan Pandemi COVID-19	187.316.000	182.292.720	97,32
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	200.050.000	132.148.901	66,06
Belanja Peemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19			
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>531.526.000</b>	<b>458.395.332</b>	<b>86,24</b>
Pengembalian Belanja		-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>531.526.000</b>	<b>458.395.332</b>	<b>86</b>

*Belanja  
Modal Rp  
690.826.000*

### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp 690.826.000 dan Rp. 2.948.701.000

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Periode 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 76,57 % dibandingkan TA 2020 karena pada tahun anggaran 2021 tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID – 19 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember  
2021 dan Tahun 2020*

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	690.826.000	115.862.500	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi		3.823.600	(100,00)
Belanja M.Peren.daan Peng.G&Bangunan			
Belanja Penambahan Nilai Gedung & Bangunan		2.829.015.000	(100,00)
Belanja Modal BLU			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>690.826.000</b>	<b>2.948.701.100</b>	<b>(76,57)</b>
Pengembalian			
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>690.826.000</b>	<b>2.948.701.100</b>	<b>(76,57)</b>

*Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin Rp  
690.826.000*

***B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin***

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 690.826.000 dan TA 2020 adalah sebesar Rp 119.686.100, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2021

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Meisn  
Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020*

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	690.826.000	115.862.500	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi		3.823.600	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>690.826.000</b>	<b>119.686.100</b>	
Pengembalian			
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>690.826.000</b>	<b>119.686.100</b>	<b>477,20</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang sebesar Rp 170.900.000 merupakan belanja modal berupa :

1. Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi

berupa PC. Unit sebanyak 4 buah sebesar Rp 59.000.000

2. Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi berupa Laptop sebanyak 2 buah sebesar Rp 29.500.00
3. Pengadaan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor sebanyak 2 unit sebesar Rp 58.400.000
4. Pengadaan untuk Operasional Kantor berupa LCD Projector/ Infocus sebesar Rp 9.000.000
5. Pengadaan untuk Operasional Kantor berupa Televisi sebesar Rp 5.000.000
6. Pengadaan untuk Operasional Kantor berupa Kursi Besi/Metal sebanyak 5 buah sebesar Rp 10.000.000

Realisasi Belanja Modal semester II Tahun 2021 pada Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan sebesar Rp 519.926.00 yang masuk kedalam aset tetap berupa :

1. Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi sebesar Rp. 190.412.000,-
2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp. 54.394.000,-
3. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 sebesar Rp. 275.120.000,-

*Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin –  
Penanganan  
Pandemi  
COVID-19 nihil*

#### **B.5.1.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19 Semester II Per 31 Desember 2021 Rp 0 dan TA 2020 adalah sebesar Rp3.823.600. Pada TA 2020 terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 yang berasal dari pembelian clinical thermometer pada Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang.

*Belanja  
Gedung dan  
bangunan  
nihil*

### ***B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan***

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II Per 31 Desember 2021 dan TA 2020 sebesar Rp 0 dan Rp 2.829.015.000. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2021.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan*

*Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020*

URAIAN JENIS BELANJA	REAL DES 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peren. & Pengawasan Gedung dan Bangunan			
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	2.829.015.000	-100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0		
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	0		
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>2.829.015.000</b>	
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>2.829.015.000</b>	<b>-100,00</b>

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Beban Dibayar  
di Muka  
nihil*

### **C.1 Belanja Dibayar di Muka (prepaid)**

Nilai Belanja Dibayar di Muka Semester II Per 31 Desember 2021 dan TA 2020 sebesar Rp. 0 dan Rp. 51.378.066 Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja atas sewa kendaraan operasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang masa sewanya berakhir pada tahun 2021. Pada Tahun Anggaran 2021 tidak ada belanja dibayar dimuka pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung.

*Persediaan  
Rp.912.598.198*

### **C.2 Persediaan**

Nilai Persediaan Semester II Per 31 Desember 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 912.598.198 dan Rp 776.187.651

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Semester II Per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Persediaan	PER 31 DESEMBER 2021	TH 2020
Barang Konsumsi	912.598.198	776.115.651
Bahan Baku		
Barang untuk Pemeliharaan		72.000
Persediaan Lainnya		
Persediaan untuk berjaga-jaga		
<b>Jumlah</b>	<b>912.598.198</b>	<b>776.187.651</b>

Nilai Persediaan pada Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang sebesar Rp 635.626.189 dan nilai Persediaan pada Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan sebesar Rp 276.972.009. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer. Semua Persediaan terkait COVID-19 telah habis pakai per 31 Desember 2021

*Tanah Rp  
22.967.908.000*

### **C.3 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 22.967.908.000 dan Rp 22.967.908.000

*Rincian Tanah Per 31 Desember 2021*

<b>Saldo Nilai Perolehan Tahun 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>22.967.908.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
Transfer Masuk		
Reklasifikasi		
<b>Mutasi kurang:</b>		
Revaluasi aset		
Penghapusan		
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>22.967.908.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021		
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>22.967.908.000</b>

Nilai tanah pada Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang sebesar Rp 16.270.913.000 dan pada Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan sebesar Rp 6.696.995.000

*Peralatan dan  
Mesin Rp  
13.654.485.883*

**C.4 Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 13.654.485.883 dan Rp 12.451.899.982. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

<b>Saldo Nilai Perolehan Tahun 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>12.451.899.982</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
Koreksi Saldo Awal	Rp	317.027.755
Pembelian	Rp	690.826.000
Transfer Masuk	Rp	391.738.193
Reklasifikasi		
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi		
Transaksi Normalisasi BMN		
<b>Mutasi kurang:</b>		
Transfer Keluar	Rp	(197.006.047)
Penghapusan		
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>13.654.485.883</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021		
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>1.505.115.534</b>

Terdapat Pembelian Peralatan dan Mesin pada Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang sebesar Rp 170.900.000 berupa PC, Unit, Laptop, Motor, TV, Kursi, dan LCD sedangkan Pembelian Peralatan dan Mesin pada Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan sebesar Rp 519.926.00 berupa Mobil, Tangki Air, dan Brangkas

Sedangkan Transfer Masuk pada Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang dari Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar Rp 101.187.350 berupa Antene UHF Portable sebesar Rp 6.713.500, Handy Talky (HT) sebesar 15.716.000, Unit Pemancar UHF Stationary sebesar Rp 71.657.000, dan Mast Tower sebesar Rp 7.100.850 dan pada Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan dari Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar Rp 290.550.843 berupa Mast Tower sebesar Rp 14.201.700, Unit Pemancar UHF Stationary sebesar Rp 71.657.000, Antene UHF Portable sebesar Rp 6.713.500, Unit Tranceiver Ssb Stationary sebesar Rp 2.336.000, Handy Talky (HT) sebesar Rp 7.858.000, dan Rak Sarver sebesar Rp 187.784.000

Transfer Keluar pada Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang kepada Direktorat Jenderal Imigrasi berupa Server sebesar Rp 83.493.080 sedangkan pada Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan kepada Lembaga Pemasarakatan Tanjungpandan berupa Minibus sebesar Rp 113.512.967

### **C. 5 Gedung dan Bangunan**

*Gedung dan  
Bangunan Rp  
14.834.381.628*

Saldo gedung dan bangunan Semester II Per 30 September 2021 dan Tahun 2020 adalah Rp 14.834.381.628 dan Rp 15.067.916.303. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>15.067.916.303</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
Pembangunan Gedung		
Koreksi Pencatatan		
<b>Mutasi kurang:</b>		
Koreksi Pencatatan	Rp	233.534.675
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>14.834.381.628</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	Rp	2.044.429.190
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>12.789.952.438</b>

*Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan*

<b>Bangunan Gedung</b>	<b>14.713.358.628</b>
Saldo awal	14.946.893.303
Koreksi Pencatatan Nilai/kuantitas	(233.534.675)
<b>Tugu Titik Kontrol / Pasti</b>	<b>121.023.000</b>
Saldo Awal	121.023.000
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>14.834.381.628</b>

*Aset Tetap  
Lainnya Rp  
13.334.998*

### **C.6 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah Rp. 13.334.998 dan Rp. 13.334.998. Aset tetap lainnya merupakan bahan perpustakaan berupa monografi.

<b>Saldo Nilai Perolehan Tahun 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>13.334.998</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
Pembelian		
Hibah Barang		
Transfer Masuk		
Koreksi tambah		
<b>Mutasi kurang:</b>		
Penghentian dari penggunaan		
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>13.334.998</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>13.334.998</b>

Aset Tetap Lainnya pada Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang sebesar Rp 272.849 dan pada Kanim Kelas II TPI Tanjungpandan sebesar Rp 13.062.149

### C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap Rp  
(14.193.799.539)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing Rp (14.193.799.539) dan Rp (12.399.879.446). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	13.654.485.883	12.149.370.349	1.505.115.534
Gedung dan Bangunan	14.834.381.628	2.044.429.190	12.789.952.438
Jalan, Imigrasi, dan Jaringan			
Aset Tetap Lainnya	13.334.998		
<b>Jumlah</b>	<b>28.502.202.509</b>	<b>14.193.799.539</b>	<b>14.308.402.970</b>

*Aset Tak  
Berwujud Rp  
43.808.227*

### C.8 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah Rp 43.808.227 dan Rp 40.898.932 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Satker Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berupa Software. Terdapat Transfer Masuk berupa Software

sebesar Rp 2.909.295 pada Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang. Mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan Tahun 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>40.898.932</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
Pembelian		
Transfer Masuk	Rp	2.909.295
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>43.808.227</b>
Amortisasi	Rp	37.854.304
<b>Nilai Buku per 31 Desember</b>	<b>Rp</b>	<b>5.953.923</b>

*Aset Lain-Lain*

*Rp*

*679.521.524*

**C.9 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah Rp 679.521.524 dan Rp 679.521.524

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Tahun 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>679.521.524</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
-reklasifikasi dari aset tetap		
<b>Mutasi kurang :</b>		
-Penghapusan		
-Transaksi Normalisasi BMN (yang dihentikan)		
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>679.521.524</b>
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2021	Rp	679.521.524
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

### C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya Rp  
(720.352.826)*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp (720.352.826) dan Rp (683.369.709). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Lisensi	-		
Software	43.808.227	40.831.302	2.976.925
<b>Jumlah</b>	<b>43.808.227</b>	<b>40.831.302</b>	<b>-</b>
Aset lain-lain	679.521.524	679.521.524	-
<b>Jumlah</b>	<b>723.329.751</b>	<b>720.352.826</b>	<b>2.976.925</b>

*Ekuitas Rp*  
*38.280.336.057*

### **C.11 Ekuitas**

Ekuitas Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 38.191.886.093 dan Rp 38.965.796.301. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan  
PNBP Rp  
19.483.200*

### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp 19.483.200 dan Rp 15.861.352. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 32,95%. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya pejabat struktural yang menyewa Rumah Dinas pada Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang dan adanya penyesuaian tarif sewa rumah dinas pada Kanim Kelas I TPI Pangkalpinang yang merupakan tindak lanjut dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember  
2021 dan Tahun  
2020*

URAIAN	PER 30 DESEMBER 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	19.483.200	15.421.474	26,34
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		439.878	
<b>Jumlah</b>	<b>19.483.200</b>	<b>15.861.352</b>	<b>22,83</b>

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berasal dari pendapatan sewa rumah dinas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sebesar Rp 19.224.000 dan Rp 259.200

## Beban Pegawai

Rp 5.758.176.760

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 5.758.176.760 dan Rp 5.142.793.760. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2021 naik sebesar 13% dibandingkan Tahun 2020 disebabkan oleh Mutasi Pegawai antar Satker dan Penambahan CPNS pada Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang dan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungpandan

#### Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 DESEMBER 2021	TAHUN 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.846.299.140	3.469.869.740	10,85
Beban Pembulatan Gaji PNS	77.798	57.338	35,68
Beban Tunj.Suami/Istri PNS	238.329.404	224.152.890	6,32
Beban Tunj.Anak PNS	58.985.024	59.601.264	-1,03
Beban Tunj.Struktural PNS	175.420.000	164.130.000	6,88
Beban Tunj.Fungsional PNS	260.700.000	253.680.000	
Beban Tunj.PPh PNS	1.795.602	1.762.900	1,86
Beban Tunj.Beras PNS	223.850.220	175.401.240	27,62
Beban Uang Makan PNS	760.896.000	655.163.000	16,14
Beban Tunj.Umum PNS	96.265.000	63.640.000	51,26
Beban Lembur	96.484.000	75.811.000	
<b>Jumlah</b>	<b>5.759.102.188</b>	<b>5.143.269.372</b>	<b>12</b>
<b>Pengembalian</b>	<b>925.428</b>	<b>475.612</b>	
<b>Jumlah</b>	<b>5.758.176.760</b>	<b>5.142.793.760</b>	<b>12</b>

Terdapat pengembalian beban pegawai sebesar Rp 925.428 yang terdiri dari Pengembalian beban Tunjangan

Umum PNS sebesar Rp 925.000 dan Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp 428 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang. Hal ini disebabkan adanya perpindahan Jabatan dari Fungsional Umum ke Fungsional Tertentu sehingga pegawai tersebut harus mengembalikan kelebihan pembayaran atas Tunjangan Umum tersebut.

*Beban  
Persediaan Rp  
594.746.378*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 594.746.378 dan Rp 697.090.754. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan Tahun 2021 disebabkan oleh berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut

*Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2021 dan  
Tahun2020*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>Per 31 Desember 2021</b>	<b>TA 2020</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Beban Persediaan Konsumsi	594.746.378	697.090.754	(14,68)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges			
Beban Persediaan bahan baku			
Beban Persediaan u berjaga-jaga			
Beban Persediaan Lainnya			
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>594.746.378</b>	<b>697.090.754</b>	<b>-14,68</b>

*Beban Barang  
dan Jasa Rp  
4.302.939.605*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.302.939.605 dan Rp 4.412.555.231. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut. Beban Barang dan Jasa tahun 2020 menurun sebesar 2,51 persen disebabkan oleh berkurangnya Pagu anggaran belanja sewa Tahun Anggaran 2021.

Per 31 Desember 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Desember 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	924.713.455	782.187.057	18,22
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	50.940.000	27.758.600	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	5.223.930	8.923.500	(41,46)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	203.480.000	207.680.000	(2,02)
Beban Barang Operasional Lainnya	167.794.011	131.418.017	27,68
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID	143.953.711	200.920.376	0,00
Beban Bahan	399.350.764	297.765.775	34,12
Beban Honor Output Kegiatan	118.990.000	43.890.000	171,11
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.211.977.627	1.512.297.921	(19,86)
Beban Langganan Listrik	253.536.620	214.529.759	18,18
Beban Langganan Telepon	1.942.520	2.234.340	(13,06)
Beban Langganan Air	9.000.000	9.000.000	0,00
Beban Sewa	661.488.066	937.342.386	(29,43)
Beban Jasa Profesi	6.300.000	13.300.000	(52,63)
Beban Jasa Lainnya	12.100.000	8.150.000	48,47
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	132.148.901	16.440.000	703,83
<b>Jumlah</b>	<b>4.302.939.605</b>	<b>4.413.837.731</b>	<b>-2,51</b>
<b>Pengembalian</b>		<b>1.282.500</b>	
<b>Jumlah</b>	<b>4.302.939.605</b>	<b>4.412.555.231</b>	

*Beban*

*Pemeliharaan Rp.*

*903.254.538*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 903.254.538 dan Rp 776.464.761. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 16,33 persen dibandingkan Tahun 2020 disebabkan oleh kenaikan Pagu Anggaran untuk Belanja Pemeliharaan.

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	442.293.876	382.050.000	15,77
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	453.296.351	387.334.261	17,03
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7.664.311	7.080.500	8,25
Beban Pemeliharaan Lainnya			
<b>Jumlah</b>	<b>903.254.538</b>	<b>776.464.761</b>	<b>16,33</b>

*Beban*

*Perjalanan Dinas*

*Rp 1.481.109.402*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.481.109.402 dan Rp 1.034.576.542. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 43,16% karena kenaikan Pagu Anggaran Perjalanan Dinas dan telah dilakukan optimalisasi pada pelaksanaannya.

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.317.069.789	771.441.542	70,73
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	82.950.000	68.850.000	20,48
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.500.000	49.925.000	(62,94)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	84.050.000	40.960.000	105,20
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID 19		103.400.000	
<b>Jumlah</b>	<b>1.502.569.789</b>	<b>1.034.576.542</b>	45,24
Pengembalian	21.460.387		
<b>Jumlah</b>	<b>1.481.109.402</b>	<b>1.034.576.542</b>	43,16

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp 1.602.955.873*

#### **D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.602.955.873 dan Rp. Rp. 1.755.644.092

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

#### *Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan 2020*

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/Turun (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.019.648.963	1.180.381.635	(13,62)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	548.142.105	492.797.868	11,23
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	29.210.865	77.237.985	(62,18)
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>1.597.001.933</b>	<b>1.750.417.488</b>	(8,76)
Beban Amortisasi Software	5.953.950	5.226.604	100,00
Beban Amortisasi Lisensi			
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>5.953.950</b>	<b>5.226.604</b>	13,92
<b>JUMLAH</b>	<b>1.602.955.883</b>	<b>1.755.644.092</b>	(8,70)

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional Rp  
29.383.023

## D.8 Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester II Per 31 September 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp 29.383.023 dan Rp 67.562.124

Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020

Uraian	PER 31 Des 2021	TH 2020
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	310.000	(8.571.300)
Surplus/Defisit dari Keg Non Operasional lainnya	29.073.023	76.133.424
<b>Surplus/Defisit dari Keg Non Operasional</b>	<b>29.383.023</b>	<b>67.562.124</b>

Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020

Uraian	PER 31 DES 2021	TH 2020
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	310.000	1.500.000
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		2.213.700
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		18.638.500
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	60.432.523	7.777.000
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)		502.799.324
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)		(455.295.100)
Beban Kerugian Pelepasan Aset		(10.071.300)
Beban Persediaan Rusak/Usang	(31.359.500)	
<b>Surplus/Defisit dari Keg Non Operasional</b>	<b>29.383.023</b>	<b>67.562.124</b>

\*)Pendapatan/ Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

## D.9 Rincian Beban Khusus Penangan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Uraian	31 DES 2021	TH 2020	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	143.953.711	200.920.376	-28%
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	182.292.720	51.768.115	252%
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	132.148.901	16.440.000	704%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19			
Beban Perjalanan Dinas - Penanganam Pandemi COVID-19		103.400.000	-100%
Beban Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19		3.823.600	
<b>Jumlah</b>	<b>458.395.332</b>	<b>376.352.091</b>	22%

Beban Barang Operasional merupakan pembelian atas vitamin dan masker yang habis pakai dalam rangka penanganan Covid-19 sedangkan Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid merupakan beban atas pembayaran rapid tes pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal Rp  
38.965.796.301*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal Semester II Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 38.965.796.301 dan Rp 36.891.720.421

*Defisit LO Rp  
(14.954.316.333)*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah defisit sebesar Rp. (14.954.316.333) dan Rp (13.735.701.664). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang  
Menambah/  
Mengurangi  
Ekuitas Rp  
52.096.201*

### **E.3 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas**

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 52.096.201 dan Rp. (17.394.833)

*Koreksi Nilai  
Aset Non  
Revaluasi  
Rp 52.096.201*

#### **E.3.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 52.096.201 dan Rp 0. Koreksi tersebut timbul akibat adanya koreksi atas Kursi dan Meja Portabel dari Akun Gedung dan Bangunan ke Akun Peralatan dan Mesin

*Transaksi Antar  
Entitas Rp.  
13.768.309.924*

#### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.768.309.924 dan Rp. 15.827.172.377. Transaksi Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, Antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai</b>
Diterima dari Entitas Lain	(80.225.723)
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.837.202.828
Transfer Masuk	11.332.819
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
<b>Surplus/Defisit dari Keg Non Operasional</b>	<b>13.768.309.924</b>

##### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp 80.225.723 sedangkan DKEL sebesar Rp 13.837.202.828

*Ekuitas Akhir Rp  
38.191.886.093*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas akhir Semester II Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 38.191.886.093 dan Rp 38.965.796.301

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

1. Terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp 925.428 yang terdiri dari Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp 925.000 dan Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp 428 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang. Hal ini disebabkan adanya perpindahan Jabatan dari Fungsional Umum ke Fungsional Tertentu sehingga pegawai tersebut harus mengembalikan kelebihan pembayaran atas Tunjangan Umum tersebut.
2. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 52.096.201. Koreksi tersebut timbul akibat adanya koreksi atas Kursi dan Meja Portabel dari Akun Gedung dan Bangunan ke Akun Peralatan dan Mesin